BAB III

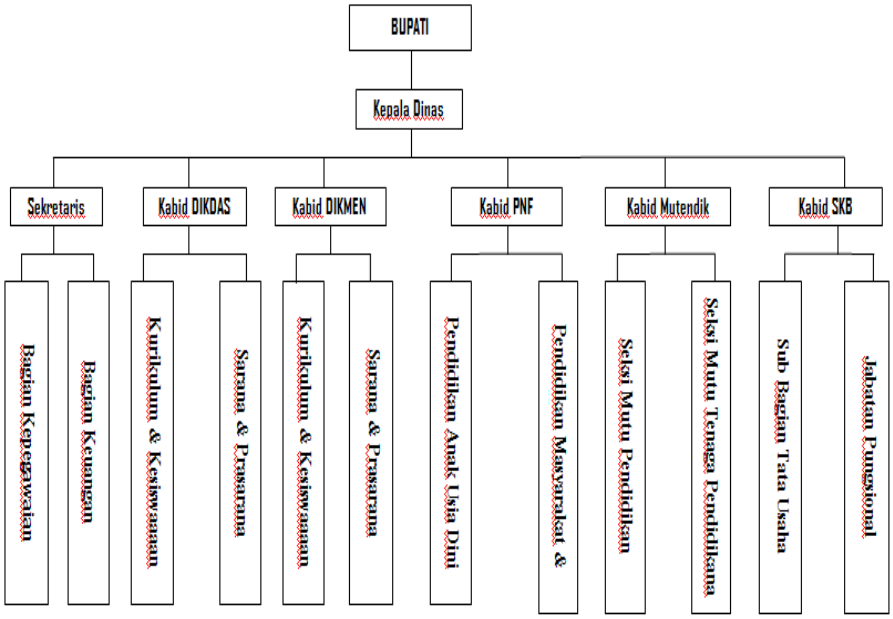
PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Ujian Nasional (UN) Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan penyelenggaraan UN Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009. Untuk itu perlu disusun Prosedur Operasi Standar (POS) sebagai pedoman agar penyelenggaraan UN Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dapat dilaksanakan secara jujur, objektif, berkeadilan, dan akuntabel.

Tingginya tingkat kelulusan Ujian Nasional untuk SD/SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, tidak memudarkan pamor Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, karena Ujian Nasional Paket C memiliki hak eligibilitas yang sama, sehingga tak perlu diragukan lulusannya dan dapat diterima di perguruan tinggi. Tahun ini sebanyak 364.984 peserta didik mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

1.2. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktuk Organisasi Dinas Pendidikan Sumedang

3.3. Deskripsi Kerja

Cara kerja praktek yang dilakukan oleh penulis selama melakukan kerja praktek di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bagian Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan adalah mengumpulkan data peserta yang akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, seperti mengikuti Program Paket A untuk setara SD yang ingin melanjutkan ke tingkat SMP, Program Paket B setara SMP yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA, dan Program Paket C untuk setara SMA yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Pengumpulan data dilakukan

dengan cara mengumpulkan data-data peserta dari panitia PKBM setempat. Setelah semua data terkumpul kemdian data peserta yang akan mengikuti Ujian dimasukan ke dalam applikasi Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan untuk diserahkan kepada panitia penyelenggara Ujian tingkat Provinsi.